

DOKUMEN KERJA

Kerangka Kerja Bantuan Kemanusiaan dan Pemulihan Dini Memastikan adanya pilihan bagi mereka yang kehilangan rumah dan/atau sumber pendapatan dalam Tsunami/Gempa Bumi

DRAFT-TERJEMAHAN TIDAK RESMI

TUJUAN DARI DOKUMEN INI

Tujuan dari dokumen kerja ini adalah untuk menjadi panduan dalam mengembangkan kerangka kerja kemanusiaan pemulihan dini secara keseluruhan yang memberikan informasi tentang opsi-opsi dan strategi-strategi dalam membantu mereka yang mengungsi dan kehilangan rumah dan/atau sumber penghidupan. Dokumen ini juga akan menjadi dasar bagi kebijakan resmi yang akan dipresentasikan kepada Pemerintah Indonesia.

Lebih khusus, dokumen ini akan:

- Memberikan dasar bagi pengaturan kembali yang signifikan terhadap kegiatan PBB dan aktor-aktor utama lainnya terhadap pemulihan, karena kita hampir pada tahap dimana kebutuhan darurat telah dipenuhi.
- Bertindak sebagai katalisator dalam mendukung pemerintah Indonesia untuk mengembangkan suatu kerangka kerja yang lebih holistik untuk memastikan adanya pilihan-pilihan pemulihan yang lebih lengkap bagi mereka yang terkena dampak bencana.
- Mengatur sumberdaya utama dalam mendukung pilihan penampungan sukarela yang telah berjalan untuk melengkapi usaha-usaha Pemerintah Indonesia saat ini, misalnya tempat relokasi.

Secara luas dokumen ini: (i) menggambarkan tingkat kelompok masyarakat yang terkena bencana; (ii) memaparkan pilihan-pilihan bantuan yang telah tersedia dan (iii) menunjukkan alternatif-alternatif atau opsi-opsi pelengkap yang memerlukan dukungan; (iv) meninjau kembali strategi IASC saat ini terhadap tiap-tiap pilihan bantuan (strategi diinformasikan oleh dan berdasarkan pada Prinsip-Prinsip Panduan Pengungsian Internal dari PBB); dan (v) sebagai dasar bagi 'Rencana Kegiatan' untuk masing-masing sektor.

Dokumen kerja ini dan 'Rencana Kegiatan' sektoral akan terus direvisi dan diperbaharui sejalan dengan perubahan situasi dan perkembangan konsultasi.

PENDAHULUAN

Gempa Bumi dan tsunami yang menimpa Provinsi Aceh pada 26 Desember 2004 telah meninggalkan kerusakan dimana-mana, korban jiwa dan sejumlah besar pengungsi yang kehilangan rumah dan/atau mata pencaharian mereka.

Satu bulan setelah bencana, dimana masyarakat nasional dan internasional beralih dari tanggap darurat ke pemulihan dini, situasi masyarakat yang terkena bencana di Aceh masih kompleks. Pergerakan pengungsi antara lokasi pengungsian spontan dan masyarakat penampung, meningkatnya beban bagi keluarga yang menampung mereka yang kehilangan rumah; keinginan

dari banyak orang untuk dapat segera membangun hidup mereka kembali, dan sejumlah besar masyarakat yang tidak terkena dampak secara fisik atau mengungsi tapi sumber mata pencaharian mereka telah hilang, yang berarti bahwa masyarakat kemanusiaan harus memposisikan diri mereka untuk memberikan respon terhadap kebutuhan dari berbagai kategori masyarakat yang berbeda, masing-masing dengan kebutuhan yang berbeda.

Sementara berbagai pilihan untuk mendukung mereka yang telah kehilangan rumah dan/atau mata pencaharian mereka sedang diberikan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan dari aktor-aktor lain, pilihan bantuan pelengkap perlu diidentifikasi dan dicari agar proses pemulihan dapat dimulai.

Asumsi mendasar dari strategi ini yaitu masyarakat kemanusiaan harus bekerja dibawah kepemimpinan Pemerintah Indonesia dengan dialog yang konstan dengan masyarakat yang terkena bencana untuk melengkapi usaha-usaha saat ini dan memastikan adanya pilihan bantuan yang komprehensif yang merespon kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda dari mereka yang kehilangan rumah serta mendukung usaha-usaha pemulihan mata pencaharian.

Ini akan memerlukan (1) kerjasama dengan mereka yang terkena bencana sehingga kita dapat mengkaji secara akurat kebutuhan dan prioritas, (2) menyediakan masukkan tambahan dan mendukung rencana bantuan yang ada, (3) memulai dan mencari kegiatan yang belum dilaksanakan namun diperlukan dan (4) memobilisasi semua badan-badan PBB yang memimpin kelompok kerja sektoral dan dinas pemerintah terkait untuk memonitor kebutuhan masyarakat dan memastikan adanya akses terhadap kebutuhan dasar dan kegiatan pemulihan sejalan dengan strategi yang dikembangkan di bawah ini.

CAKUPAN MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

Sementara statistik yang komprehensif masih sukar untuk dijangkau, saat ini diperkirakan jumlah orang yang mengungsi bervariasi antara 330.000 sampai 600.000 serta masyarakat yang terkena mencapai 1 juta orang.

Dikarenakan lokasi geografis bencana yang luas, dan gabungan efek dari gempa bumi dan tsunami, terdapat cakupan luas masyarakat yang terkena dengan tingkat yang berbeda-beda sehingga tidak mudah untuk dikelompokkan. Ada orang yang kehilangan seluruh warganya, banyak anggota keluarga, rumah dan tanah; orang yang kehilangan rumah tapi mempunyai tanah dan masyarakat untuk kembali bersama; dan orang yang rumahnya rusak tapi masih dapat diperbaiki. Ditambah lagi, banyak diantara mereka yang kehilangan atau tidak kehilangan rumah mereka, namun kehilangan aset dan sumber pendapatan, menderita trauma yang sangat dalam, dan kehilangan anggota keluarga yang merupakan pencari nafkah utama. Juga banyak masyarakat yang menampung pengungsi dan aset mereka sekarang menipis.

Kategorisasi diatas menunjukkan skala potensi kebutuhan. Didalam kelompok-kelompok masyarakat ini, terdapat sejumlah besar perbedaan dalam hal latar belakang sosial ekonomi, tipe daerah asal (pemukiman masyarakat desa versus pemukiman masyarakat kota); dan akibatnya, memiliki kebutuhan masing-masing. Masyarakat kemanusiaan harus dapat menyesuaikan strategi bantuan mereka untuk mencerminkan bervariasinya situasi saat ini dimana masyarakat terus bergerak baik secara geografis dan diantara kategori kebutuhan.

TINGKAT OPSI BANTUAN

Umumnya masyarakat yang terkena bencana saat ini dapat dibagi dalam 6 kelompok sehubungan dengan opsi bantuan saat ini dan potensi bantuan mendatang. Kelompok tersebut mencakup: (1) masyarakat yang masih tinggal di tempat penampungan sementara (mesjid dan sekolah) yang segera membutuhkan relokasi karena tempat-tempat ini diklaim kembali untuk kepentingan publik; (2) masyarakat yang tinggal di tempat penampungan dadakan dimana mereka menerima bantuan sementara atau yang terorganisir; (3) masyarakat yang menumpang pada keluarga; (4) masyarakat yang tidak dapat menumpang pada keluarga atau pulang ke rumah dan berencana untuk pergi ke tempat-tempat relokasi; (5) Masyarakat yang telah pulang kerumahnya dan sedang membangun kembali kehidupan mereka; dan (6) masyarakat yang terkena lainnya yang mungkin atau tidak kehilangan rumah mereka tetapi kehilangan aset dan sumber pendapatan.

Penting untuk dimengerti bahwa terdapat perbedaan-perbedaan geografis yang besar di seluruh Provinsi Aceh ini dalam cara masyarakat mengatasi dan dibantu. Populasi kemungkinan besar akan berpindah-pindah diantara pilihan bantuan yang ada dan bantuan sebaiknya disediakan dengan cara yang dapat mendukung hal ini, dan hal ini dapat mendorong pada solusi yang berkesinambungan. Perpindahan masyarakat ke solusi-solusi yang lebih langka akan mengidentifikasi kegagalan relatif dalam pelaksanaan strategi – atau ketidaksesuaian mereka – yang mana harus dipenuhi tanpa penundaan.

Berikut ini adalah ringkasan garis besar dari opsi-opsi bantuan saat ini dan mendatang yang sebaiknya dapat membantu dalam pembentukan ‘Rencana Kegiatan’ dan peninjauan kembali kesenjangan sektoral dan strategi.

1. **Bantuan di tempat penampungan sementara:** segera setelah bencana, banyak orang menemukan tempat perlindungan di sekolah-sekolah, mesjid dan bangunan publik lainnya. Di beberapa daerah, sebagian besar masyarakat ini telah pindah ke penampungan dadakan atau tinggal dengan keluarga mereka dikarenakan mereka tidak menerima cukup bantuan di tempat-tempat ini atau bangunan-bangunan ini telah diklaim kembali untuk kepentingan publik; di daerah-daerah lain mereka mungkin berharap untuk tetap tinggal di bangunan-bangunan ini untuk sementara waktu dimana mereka sedang membangun kembali kehidupan mereka. **Strategi:** Sementara di pihak pemerintah sedang mengadvokasi bahwa pada minggu-minggu mendatang tidak ada lagi orang yang tinggal di lokasi-lokasi seperti ini, IASC percaya bahwa semua orang yang masih tinggal di lokasi-lokasi tersebut harus mendapatkan bantuan yang cukup. Selanjutnya, IASC percaya bahwa masih penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang akan direlokasikan dalam waktu mendatang dibantu dalam penemuan lokasi-lokasi baru yang memenuhi standar-standar internasional dan mendukung pemulihan mata pencaharian. Untuk mencapai ini, survey berkala pada lokasi-lokasi penampungan yang ada harus dilakukan dan hasilnya harus disampaikan ke kelompok-kelompok kerja untuk tindak lanjut yang sesuai. OCHA sebaiknya mendukung inisiatif-inisiatif dalam pelaksanaan survey ini dengan bekerjasama dengan Pemerintah.
2. **Bantuan di Penampungan Spontan:** Penampungan spontan dimana sejumlah orang yang kehilangan rumah mereka menemukan tempat perlindungan sementara, bermunculan

di sepanjang Banda Aceh, Aceh Besar dan sepanjang pantai barat dan timur tidak lama setelah bencana. Bentuk dari penampungan spontan bervariasi dari tenda sederhana sampai ke kamp dengan tenda yang dikelola TNI serta beberapa bangunan kosong yang digunakan menampung sekelompok orang. Lokasi yang terbesar menampung lebih dari 3000 orang dan lokasi terkecil kurang dari 10 orang. Di banyak tempat, penampungan spontan telah ditutup dengan adanya perpindahan masyarakat ke keluarga penampung atau telah kembali ke rumah masing-masing untuk memperbaiki rumah mereka, tapi di tempat lain penampungan spontan sepertinya akan berada untuk waktu yang lama. Namun diperkirakan masih ada sekitar 30 lokasi di Banda Aceh dan Aceh Besar beberapa sepanjang pantai barat. Banyak dari penampungan spontan yang tersisa juga berfungsi sebagai titik distribusi bagi mereka yang telah tinggal dengan keluarga penampung. Sampai saat ini belum ada bantuan secara formal kepada mereka yang berada dalam kondisi seperti ini. Banyak yang dibantu oleh pemerintah local (kecamatan), bantuan tidak berkelanjutan oleh LSM, dan distribusi IFRC/PMI. Saat ini sedang dilakukan kegiatan untuk memverifikasi secara geografis lokasi penampungan spontan yang masih ada di Banda Aceh and Aceh Besar. Kajian Air dan Sanitasi serta Kesehatan telah dilakukan di lokasi yang telah diverifikasi. Juga diantisipasi bahwa hanya beberapa penampungan spontan yang akan tersisa saat proses formal relokasi telah dimulai dan masyarakat terus bergabung bersama keluarga penampung, paling tidak dalam jangka pendek sampai menengah. **Strategi:** Komite Lintas Lembaga (IASC) harus memastikan pemantauan yang berkelanjutan dan pemberian bantuan darurat di semua lokasi yang masih tersisa. Meskipun pemerintah menginginkan semua lokasi penampungan sementara “ditutup” dalam beberapa minggu kedepan, sangat penting bagi masyarakat kemanusiaan (humanitarian community) untuk mengadvokasi bantuan yang berkelanjutan di lokasi dimana masyarakat masih di lokasi penampungan sementara namun secara bersamaan membangun kembali rumah dan kehidupan mereka. OCHA harus mendukung inisiatif dalam mengorganisir masyarakat kemanusiaan untuk secara regular mengadakan survey di tempat penampungan sementara dan memastikan tindak lanjutnya dalam kelompok kerja sector.

3. **Bantuan ke Komunitas Penampung (Host Communities):** Diperkirakan bahwa mayoritas dari mereka yang kehilangan rumah saat ini tinggal bersama keluarga/komunitas penampung. Khususnya mereka yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar, banyak yang telah pindah dari lokasi penampungan sementara untuk tinggal dengan keluarga atau tetangga di wilayah lain di propinsi Aceh. Bantuan kepada komunitas penampung saat ini dilakukan secara ad-hoc dan masih banyak celah atau kekosongan serta kajian menunjukkan bahwa kebutuhan akan barang non-makanan, makanan, penampungan, air dan sanitasi mulai meningkat. Sementara ini sepertinya peg, namun pada tanggal 26 January telah diumumkan bahwa mereka yang tinggal bersama keluarga penampung berhak menerima bantuan sebesar Rp. 150,000 per jiwa per bulan (sebagai pengganti makanan yang diberikan di tempat relokasi). Meskipun ada bantuan tersebut, belum jelas bagaimana keluarga penampung dapat terbantu dan apakah bantuan keuangan ini dapat secara akurat mendukung semua kebutuhan. **Strategi:** Komite Lintas Lembaga harus mendekati pemerintah untuk memastikan paket bantuan yang mendukung keluarga penampung dan mereka yang ditampung. Bantuan seperti ini bisa dalam bentuk kombinasi distribusi makanan, uang dan insentif lainnya yang sejalan dengan focus masyarakat

internasional dan nasional yaitu pemulihan dini/rehabilitasi darurat dan menghidupkan ekonomi local. OCHA harus mendukung system untuk memantau kebutuhan keluarga penampung dan pengungsi yang tinggal bersama mereka.

4. **Bantuan di tempat Relokasi:** Rencana pemerintah Indonesia meliputi relokasi sejumlah pengungsi ke lokasi semi permanent untuk periode maksimum 2 tahun. Pemerintah bertujuan menampung sekitar 100,000 sampai 150,000 jiwa di lokasi-lokasi tersebut. Saat ini sementara berlangsung konstruksi dalam bentuk barak di sekitar 37 lokasi di propinsi Aceh dengan jadwal penyelesaian sebagian lokasi pada awal Februari. Tempat relokasi ini mempunyai kapasitas sekitar 65,000 jiwa. Lokasi-lokasi ini juga saat ini sedang dikaji per sector oleh tim gabungan Pemerintah/PBB/LSM. Tim ini akan melaporkan kelayakan lokasi-lokasi dan bisa memberikan rekomendasi bagi pemilihan dan pembangunan lokasi baru, apabila diperlukan. Pemindahan ke penampungan semi-permanen menjadi penting bagi pengungsi yang rentan yang tidak mungkin bergabung dengan keluarga penampung, karena skala kerusakan yang dasyat dan perencanaan tata kota akan memakan waktu yang lama. Apakah relokasi seperti ini adalah untuk kepentingan terbaik komunitas yang kecil, khususnya di wilayah pantai barat atau dimana masyarakat dapat langsung memulai proses pemulihan masih merupakan masalah lain. **Strategi:** Komite Lintas Lembaga (IASC) percaya bahwa relokasi ke tempat ini hanya dilakukan sebagai langkah terakhir apabila tidak ada pilihan lain dan semua lokasi harus memenuhi standard internasional. Relokasi ke tempat ini harus dilakukan secara sukarela. IASC bertujuan untuk mengurangi waktu yang diperlukan oleh masyarakat untuk tinggal dalam tempat relokasi sementara (secepat mungkin). Juga harus dibuat strategi bagi pemulangan/pemulihan masyarakat dari tempat relokasi. Sangat penting membantu dan memberikan masukan pada pemerintah untuk memenuhi standard internasional di tempat relokasi juga meningkatkan kapasitas masyarakat disekitar tempat relokasi: Hal ini dapat mengurangi resiko ketegangan antar masyarakat, dan juga memastikan fasilitas umum seperti sekolah atau pusat kesehatan dapat menampung bertambahnya pengguna fasilitas.
5. **Bantuan untuk mendukung pemulangan dan pemulihan dini:** Didalam banyak kasus, populasi dari komunitas kecil yang selamat cenderung memilih untuk membangun kembali rumah mereka dan memulai proses pemulihan secepatnya. Dalam beberapa kasus, mereka telah memulai mengorganisir kelompok mereka sendiri dengan bantuan aparat pemerintah Indonesia. Beberapa pengaturan telah dibuat dimana perusahaan konstruksi membangun rumah prefab di Calang dan Meulaboh. Solusi ini bisa berikan pada masyarakat pada atau bersebelahan dengan lokasi rumah awal mereka dan bisa menjadi alternative yang lebih baik disbanding tempat relokasi karena mendukung rencana pemulangan dan pemulihan dini. Sangat penting juga dilakukan program pemulihan penghidupan dan asset ditempat seperti ini pula. **Strategi:** Komite Lintas Lembaga (IASC) percaya bahwa pemulangan dan pemulihan dini harus didukung sebagai pilihan primer bagi mereka yang kehilangan rumah. Paket bantuan harus direncanakan agar dapat mendukung akses keluarga pada penampungan jangka panjang, penghasilan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, secepat mungkin. Hal ini membutuhkan dukungan kuat dari semua sektor. PBB mengusulkan program bersama pemerintah/PBB/LSM yang mendukung komunitas seperti ini. Penampungan jangka panjang harus diusahakan sedekat mungkin dengan lokasi awal mereka yang terkena

dampak. Harus diantisipasi bahwa kebijakan bagi pemulangan dan pemulihan dini akan bervariasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sebagai tambahan, akan ada pengungsi yang tidak bisa kembali ke rumah mereka karena tanah tempat mereka tinggal telah hilang akibat perubahan garis pantai, berada pada wilayah dimana kerusakan dan polusi menyebabkan tidak layak huni dan lokasi dimana pemerintah mungkin menetapkan tidak layak karena jarak yang terlalu dekat dengan laut. Untuk mereka, kebijakan khusus mengenai penampungan harus dihasilkan berdasarkan keinginan komunitas dan keluarga, ketersediaan lahan dan perencanaan pemerintah. Segala upaya harus ditempuh secepat mungkin untuk mengidentifikasi mereka yang masuk kategori ini dan memulai pencarian solusi dengan partisipasi penuh dari mereka yang masuk kategori ini.

6. **Bantuan ke Kelompok Populasi Lain:** Ada sejumlah masyarakat yang tidak kehilangan rumah (atau sudah bisa memperbaikinya) namun kehilangan asset dan sumber pendapatan dan membutuhkan bantuan untuk mengembalikan penghidupan mereka atau mengidentifikasi sumber penghidupan alternatif. **Strategi:** Lembaga yang focus pada pembangunan seperti UNDP, FAO, ILO, Oxfam dan lainnya harus membuat kerangka kerja bantuan dengan kerjasama yang erat dengan mereka yang terkena dampak, masyarakat sipil dan pemerintah baik local maupun nasional yang terkait. Kerangka kerja harus menyatukan kebutuhan dari mereka yang terkena dampak dengan platform pemulihan dan pembangunan yang saat ini sedang disusun dengan kepemimpinan BAPPENAS.

Akhirnya, kita harus mengakui bahwa dalam bencana ini banyak yang kehilangan dokumen identifikasi dan dokumen registrasi penting lainnya. Contohnya KTP, Ijasah pendidikan, dll. Sementara proses pemulangan berjalan dan rumah diperbaiki, ada banyak isu legal yang akan muncul termasuk kepemilikan tanah, hak warisan, dll. Lembaga PBB harus bekerja dengan pemerintah untuk mengidentifikasi dan mendata mereka yang kehilangan dokumen dan pada saat yang sama mendukung pemerintah dalam usaha-usaha, jika memungkinkan, menerbitkan kembali dokumen secara cepat dan efisien. Berkaitan dengan hak milik tanah, pendekatan yang fleksibel harus dilakukan berdasarkan pengetahuan masyarakat dan mekanisme resolusi konflik.

PENAMPUNGAN (SHELTER)
Rencana Kegiatan

Pilihan Bantuan	Target pop.	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
<p>1. Penampungan Sementara Masyarakat</p>	<p>TBD</p>	<p>1. Penampungan Sementara Masyarakat</p> <p>Advokasi dengan pemerintah Indonesia untuk transisi secara bertahap dari Penampungan Sementara ke Pemulangan atau Pemulihan Dini atau pilihan bantuan lainnya dan menyetujui rencana yang realistis mengenai mengembalikan bangunan pada fungsinya masing-masing.</p>	<p>1. Penampungan Sementara Masyarakat</p> <p>Memberikan bantuan kepada individu atau kelompok, mendukung mereka yang lebih membutuhkan tapi mendorong pencarian solusi alternative jangka panjang.</p> <p>Mendukung pemulangan dan pemulihan dini, secepat mungkin.</p> <p>Membantu populasi yang tinggal di bangunan umum agar mendapatkan lokasi baru yang memenuhi standard internasional dan mendukung pemulihan sumber penghidupan.</p> <p>Melanjutkan bantuan dengan penampungan darurat dan bantuan non makanan bagi populasi selama periode yang telah disepakati.</p> <p>Mempertahankan peran advokasi dengan pemimpin local untuk memastikan pengungsi dapat bertahan di tempat penampungan sementara selama mungkin sesuai kebutuhan.</p> <p>Kegiatan harus direncanakan untuk mengembalikan bangunan ke kondisi semula, perencanaan untuk perbaikan dan/atau peningkatan kapasitas</p>	<p>1. Penampungan Sementara Masyarakat</p> <p>Melakukan kajian kebutuhan di tempat pemukiman sementara masyarakat.</p> <p>Melakukan konsultasi secara regular dengan penerima bantuan, masyarakat dan pemuka agama, pemerintah local mengenai pilihan penampungan yang ada</p> <p>Memberikan bantuan non makanan dan solusi penampungan untuk mengurangi kepadatan.</p> <p>Memulai kegiatan pembersihan lokasi penampungan yang sebelumnya ditempati pengungsi</p>

Pilihan Bantuan	Target pop.	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
2. Penampungan spontan		<p>2. Penampungan Spontan</p> <p>PBB/LSM akan membantu pemerintah Indonesia untuk mencari solusi relokasi yang lebih cepat atau kembalinya populasi di penampungan spontan sementara secara langsung membantu mereka yang memerlukan perhatian di penampungan spontan. Pemberian bantuan non makanan dan penampungan sementara akan terus berlangsung selama belum ada solusi jangka panjang bagi pengungsi</p>	<p>2. Penampungan Spontan</p> <p>Memberikan bantuan kepada individu atau kelompok, mendukung mereka yang lebih membutuhkan tapi mendorong pencarian solusi alternative jangka panjang.</p> <p>Memfasilitasi pencapaian solusi jangka panjang dengan memfasilitasi pemulangan dan pemulihan dini. Memastikan partisipasi pengungsi dalam menentukan masa depan mereka melalui berkonsultasi dengan mereka dan pihak pemerintah..</p>	<p>2. Penampungan Spontan</p> <p>Menyelesaikan kegiatan pemetaan untuk mengidentifikasi semua penampungan spontan dan mengkaji situasi riil di penampungan spontan tersebut</p> <p>Mengkaji kelayakan pilihan pemulangan dan pemulihan pengungsi di penampungan spontan. Tergantung pada pilihan penerima bantuan, bantuan dapat diberikan untuk mendukung masuknya pengungsi kedalam komunitas masyarakat local.</p> <p>Memberikan bantuan non makanan kepada pengungsi di penampungan spontan</p> <p>Mendistribusi bahan penampungan sementara (tenda, terpal plastik) karena bantuan ini dapat digunakan kembali selama masa pemulangan dan pemulihan.</p>
3. Komunitas Penampung		<p>3. Komunitas Penampung</p> <p>Melanjutkan bantuan tanggap darurat dalam jangka pendek Continue to offer emergency relief memberikan dukungan pada pengungsi yang bersedia untuk berintegrasi dengan komunitas penampung, sepanjang penghidupan mereka terjamin.</p> <p>Dalam rangka memfasilitasi integrasi ini bantuan dapat diberikan kepada komunitas yang menampung dan mereka yang ditampung.</p>	<p>3. Komunitas Penampung</p> <p>Advokasi untuk keberlangsungan program keluarga penampung, bila tidak pilihan lain yang lebih baik.</p> <p>Memastikan kebebasan memilih penerima bantuan dengan membantu mereka di penampungan permanent didalam komunitas penampung selama mereka masih ingin tetap tinggal di tempat tersebut.</p>	<p>3. Komunitas Penampung</p> <p>Memberikan bantuan penampungan darurat dan Provide traditional emergency shelter supplies and NFIs</p> <p>Melakukan konsultasi dengan pengungsi, komunitas/keluarga penampung serta pemerintah dan pemimpin local untuk menentukan dapat diterimanya program keluarga penampung dan untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus.</p> <p>Memberikan bahan bangunan atau 'extension kits' untuk memperbesar rumah keluarga penampung dan memberikan ruang yang cukup bagi mereka yang ditampung.</p> <p>Bantuan 'Cash for shelter' (uang untuk penampungan) dapat dipertimbangkan apabila tidak menimbulkan konflik dengan lembaga lainnya yang memberikan bantuan pada komunitas penampung yang sama</p>

Pilihan Bantuan	Target pop.	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
4. Tempat Relokasi		<p>4.Tempat Relokasi</p> <p>PBB akan menawarkan dukungan yang terbatas untuk pilihan bantuan ini</p> <p>Penampungan kembali di kamp relokasi hanya bisa dipertimbangkan sebagai solusi sementara saja. Bantuan akan diberikan dalam periode tertentu yang telah disepakati. Prinsip utama dari relokasi adalah sukarela.</p>	<p>4.Tempat Relokasi</p> <p>Membantu pemerintah Indonesia dalam merancang dan memastikan tempat relokasi memenuhi standard minimum SPHERE.</p> <p>Advokasi dengan pemerintah Indonesia agar kamp dikelola oleh otoritas sipil dan hal ini menjadi dasar keterlibatan PBB/LSM dalam pilihan bantuan ini.</p> <p>Memastikan hak asasi manusia dihargai dan proses relokasi dilakukan sejalan dengan standard hukum internasional.</p> <p>Memastikan bahwa pengelolaan kamp sesuai dengan standard yang telah disepakati melalui hubungan yang berkelanjutan dengan pemerintah Indonesia, pemerintah local, pengelola kamp dan penerima bantuan.</p> <p>Memastikan keterlibatan penerima bantuan dalam pengambilan keputusan melalui kajian secara berkala dan mobilisasi masyarakat.</p> <p>Kolaborasi antara pemerintah nasional dan local untuk semua hal yang berhubungan dengan pemilihan lokasi dan status kepemilikan tanah keduanya dilakukan oleh Pemerintah tingkat provinsi, kabupaten dan tingkat desa. Koordinasi antara semua pelaku yang terlibat dalam rekonstruksi untuk menjamin penampungan yang sesuai dengan standart.</p>	<p>4.Tempat Relokasi</p> <p>Melakukan kajian secara berkala terhadap tempat relokasi untuk memastikan memenuhi standard minimum SPHERE.</p> <p>Melakukan pemantauan secara berkala mengenai kebutuhan populasi di tempat relokasi.</p> <p>Mengorganisir pertemuan formal secara berkala dengan partisipasi oleh perwakilan masyarakat dan pengelola kamp relokasi.</p> <p>Menambah kemungkinan sumber penghidupan dalam kamp termasuk dengan pilihan lainnya</p> <p>Memberikan saran pada pemerintah Indonesia mengenai cara meningkatkan perencanaan kamp sehingga dapat memenuhi standard minim Sphere.</p> <p>Kajian dan pemantuan harus dilakukan berulang kali terhadap kebutuhan dari penerima bantuan.</p>

Pilihan Bantuan	Target pop.	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
<p>5. Dukungan untuk pemulangan dan pemulihan dini</p>		<p>5. Dukungan untuk pemulangan dan pemulihan dini</p> <p>Dukungan terhadap Tahapan awal yaitu Pemulangan dan Pemulihan merupakan solusi yang paling dibutuhkan</p> <p>Pilihan bantuan seperti ini memerlukan koordinasi dengan berbagai sector yang terlibat agar respon tersebut dapat berkelanjutan dan terjamin sesuai dengan basis geografis</p>	<p>5. Dukungan untuk pemulangan dan pemulihan dini</p> <p>Menjamin pendekatan holistik untuk tahapan awal pemulangan dan pemulihan melalui jaringan rekonstruksi penampungan dengan penghidupan, pendukung aktifitas dan pengadaan materi konstruksi dalam skala besar.</p> <p>Dimulai dengan pemulangan dan pemulihan di rural area yang memungkinkan dan dilakukan secepat mungkin, sementara rekonstruksi di daerah perkotaan memerlukan waktu yang lebih untuk perencanaan perkotaan serta pencarian solusi atas hak kepemilikan</p> <p>Memungkinkan ,penerima bantuan, untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan rekonstruksi</p> <p>Menjamin perjanjian atas rehabilitasi/ rekonstruksi dari lokasi pemukiman baru dengan budaya local dan agama selama dapat disesuaikan dengan standar internasional termasuk keamanan bagi lingkungan hidup</p>	<p>5. Dukungan untuk pemulangan dan pemulihan dini</p> <p>Bila tidak ada aturan baku dari Pemerintah Nasional dan provinsi maka dilakukan melalui peninjauan bersama dengan pemerintah local seperti dalam masalah hak kepemilikan, kemungkinan teknis dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Membantu dalam kegiatan pemulihan (bahan-bahan bangunan) untuk konstruksi lanjutan yang mungkin dapat dilakukan.</p> <p>Mengusulkan beberapa alternatif untuk pemulihan penampungan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi rumah inti dengan kemungkinan penambahan ruangan bila ada waktu lebih. • Penambahan ruangan pada rumah-rumah yang ditinggali oleh pengungsi yang memilih untuk tetap tinggal dalam jangka waktu yang lama di rumah yang merupakan rumah keluarga atau kerabat tersebut. • Perlengkapan atau bahan untuk membuat tempat penampungan ditempat dimana rumah yang ada telah hancur dan pemilik rumah ingin tetap kembali ke rumah tersebut.

Pilihan Bantuan	Target pop.	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
6. Populasi lain yang terkena dampak		<p>6. Populasi lain yang terkena dampak</p> <p>Bantuan akan disediakan untuk jangka waktu pendek dan jangka panjang kepada penduduk yang tidak kehilangan rumahnya tapi kehilangan hartanya</p> <p>Dibutuhkan peninjauan atau kajian untuk menemukan usaha-usaha yang dapat menambah pendapatan</p>	<p>6. Populasi lain yang terkena dampak</p> <p>Menyediakan dukungan bagi komunitas yang terkena bencana melalui dukungan dalam pembersihan rumah, jalan-jalan, dan tempat-tempat umum serta infra struktur lainnya</p> <p>Menjamin lingkungan yang nyaman bagi penduduk lain yang terkena dampak bencana melalui keterlibatan mereka dalam usaha penambahan pendapatan, kredit makro, usaha kecil dan menengah, berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan tersebut.</p>	<p>6. Populasi lain yang terkena dampak</p> <p>Kajian terhadap populasi merupakan suatu target.</p> <p>Menyediakan alat-alat pembersih untuk penerima bantuan yang telah diidentifikasi dan dukungan untuk kehidupan.</p>

**FOOD SECURITY
Rencana Kegiatan**

Pilihan Bantuan	Target Pop.	Kebijakan/ Strategi	Kegiatan
1.Komunitas Penampunagan Sementara	530,000	1. Komunitas Penampunagan Sementara Melanjutkan pendistribusian secara umum melalui rekan-rekan LSM selama dibutuhkan. Diharapkan masyarakat yang berada ditempat ini akan pindah ke lokasi relokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia atau pilihan pemukiman lainnya.	1. Komunitas Penampunagan Sementara Kegiatan yang perlu dilakukan segera (1 Feb-1Maret) adalah melanjutkan pengidentifikasian atas kelompok-kelompok yang membutuhkan makanan sampai tidak lagi ditemukan.
2.Penampungan Spontan		2.Penampungan Spontan Melanjutkan pendistribusian melalui rekan-rekan LSM selama dibutuhkan. Diharapkan masyarakat tersebut akan pindah ke lokasi relokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia atau pilihan pemukiman lainnya.	2. Penampungan Spontan Kegiatan yang perlu dilakukan segera (1 Feb-1Maret) adalah melanjutkan pengidentifikasian atas kelompok-kelompok yang membutuhkan makanan sampai tidak lagi ditemukan.
3.Komunitas Penampung		3.Komunitas Penampung Continued general food distribution. Gradual imposition of criteria to target those most in need. Melanjutkan pendistribusian makanan.	3. Komunitas Penampung <i>Kegiatan yang perlu dilakukan segera (1 Feb – 1 Maret)</i> Bantuan makanan secara umum sepanjang bulan Februari, tapi kriteria terhadap orang yang berhak mendapatkan bantuan akan ditentukan melalui konsultasi dengan pemerintah Indonesia dan rekanan lainnya untuk tidak memasukan keluarga-keluarga yang tidak lagi membutuhkan bantuan.
4.Tempat Relokasi		4.Tempat Relokasi If requested by GoI, will study feasibility of providing food rations to residents. Will also explore with partners assistance to neighbouring communities through school feeding, MCH and nutrition education, a food component of return packages and, in rural areas, food-for-work. Jika diminta oleh pemerintah akan mempelajari kemungkinan untuk penyediaan ransom makanan bagi penguhuni. Juga akan menyelidiki bantuan Melalui pemberian makanan untuk sekolah, nutrisi pendidikan, paket pengembalian komponen makanan dan padat karya.	4.Tempat Relokasi <i>Kegiatan yang perlu dilakukan segera (1 Feb – 1 Maret)</i> Menunggu masukan dari pemerintah Indonesia dan rekanan lainnya mengenai jumlah penerima bantuan dan jumlah kebutuhannya <i>Kegiatan Jangka Menengah (1 Maret - 1 Des.)</i> Melihat kemungkinan untuk pemberian makanan di sekolah-sekolah, MCH dan nutrisi pendidikan, paket makanan, pemberian makanan bagi peserta pelatihan dan kegiatan padat karya di daerah pedesaan.

Pilihan Bantuan	Target Pop.	Kebijakan/ Strategi	Kegiatan
5. Dukungan untuk Pemulangan dan Pemulihan Dini		<p>5. Dukungan untuk Pemulangan dan Pemulihan Dini</p> <p>Possible school feeding, MCH and nutrition education, food component of return packages and in rural areas food –for-work.</p> <p>Kemungkinan untuk memberikan makanan ke sekolah-sekolah, MCH dan nutrisi pendidikan, komponen makanan dalam paket pemulangan dan kegiatan padat karya di daerah pedesaan.</p>	<p>5. Dukungan untuk Pemulangan dan Pemulihan Dini</p> <p><i>Immediate Activities (1 Feb to 1 March)</i> WFP melakukan kajian terhadap kerentanan dan analisa pemetaan serta peninjauan akan kebutuhan dan bantuan yang layak diberikan yang akan <i>di modalities</i> oleh FAO, UNDP, UNICEF, pemerintah dan rekan kerja lainnya.</p> <p><i>Medium Term Activities (1 March to 1 Dec.)</i> <i>Kegiatan Jangka Menengah (1 Maret - 1 Des.)</i> Melihat kemungkinan untuk pemberian makanan di sekolah-sekolah, MCH dan nutrisi pendidikan, paket makanan, pemberian makanan bagi peserta pelatihan dan kegiatan padat karya di daerah pedesaan.</p>
6. Populasi lain yang terkena dampak		<p>6. Populasi lain yang terkena dampak</p> <p>Pemberian makanan di sekolah, MCH dan pendidikan nutrisi komponen makanan dalam paket pemulangan dan kegiatan padat karya di area pedesaan.</p>	<p>6. Populasi lain yang terkena dampak</p> <p>WFP melakukan kajian terhadap kerentanan dan analisa pemetaan serta peninjauan akan kebutuhan dan bantuan yang layak diberikan yang akan <i>di modalities</i> oleh FAO, UNDP, UNICEF, pemerintah dan rekan kerja lainnya.</p> <p><i>Medium Term Activities (1 March to 1 Dec.)</i> <i>Kegiatan Jangka Menengah (1 Maret - 1 Des.)</i> Melihat kemungkinan untuk pemberian makanan di sekolah-sekolah, MCH dan nutrisi pendidikan, paket makanan, pemberian makanan bagi peserta pelatihan dan kegiatan padat karya di daerah pedesaan.</p>

KESEHATAN
Rencana Kegiatan

Pilihan Bantuan	Target pop.	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
1. Penampungan Sementara Masyarakat	Antara 330,000 dan 600 000	<p>Kebijakan dibawah ini mencakup ke-6 pilihan bantuan.</p> <p>1. Kantor Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten / Kota dan Departemen Kesehatan harus memimpin dalam pengembangan sector kesehatan dalam merespon akibat dari Tsunami.</p> <p>2. Aktifitas pelayanan kesehatan dari rekanan pelayan kesehatan internasional harus diperkuat atau lebih mengutamakan perbaikan pada sistem pelayanan kesehatan untuk umum dibanding membuat kembali struktur yang sama.</p> <p>3. Sebisa mungkin, institusi-institutasi akademik, LSM- LSM lokal dan lainnya diberdayakan sebagai partner implementasi dalam penguatan kapasitas nasional dan sumber daya dasar.</p> <p>4. Bantuan yang diberikan harus berdasar pada kebutuhan dan diharapkan tidak akan ada perbedaan perlakuan antara pengungsi yang berada dirumah keluarga dengan yang tidak memiliki tempat penampungan</p>	<p>Strategi dibawah ini mencakup ke-6 pilihan bantuan</p> <p>Penguatan dalam sector kesehatan dengan menggunakan kelompok koordinasi sector kesehatan yang telah ada dan beberapa sub bagian sebagai mekanisme koordinasi yang prinsipil, dan memastikan keterlibatan yang lebih baik dari pemerintah provinsi.</p> <p>Menyediakan bantuan teknis dan logistic bagi tim kesehatan provinsi dan kabupaten/ kota dan mengizinkan mereka untuk menghidupkan kembali tempat pelayanan kesehatan umum dan pelayanan penyembuhan dengan perhatian yang lebih khusus pada pelayanan utama; penguatan kapasitas kesehatan dengan berkoordinasi dengan badan-badan internasional.</p> <p>Mengirim pelayan kesehatan yang layak, dan tim kesehatan umum untuk mengintervensi ke daerah yang terkena bencana termasuk ke tempat penempatan pengungsi dan juga untuk pengungsi yang berada dirumah keluarga.</p> <p>Memastikan bahwa masyarakat yang terkena bencana akan tetap menerima pelayanan kesehatan yang layak walaupun telah di tempatkan, dikembalikan atau di relokasikan</p>	<p>Kegiatan dibawah ini mencakup ke-6 pilihan bantuan</p> <p><i>Penguatan koordinasi bidang kesehatan</i> Perluasan koordinasi kesehatan ke Calang, Lamno, Meulaboh dan Medan. Menyelesaikan pengkajian terhadap pengungsi di wilayah pantai timur. Menyediakan data kegiatan yang di update dan peta yang menunjukkan badan-badan yang bekerja dibidang kesehatan dalam jngka waktu yang ditentukan (\pm 6 bulan)</p> <p><i>Menyediakan bantuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dalam memastikan pengiriman pelayanan kesehatan yang layak dan mengintervensikan kesehatan umum bagi seluruh masyarakat yang terkena bencana.</i></p> <p>Menyediakan kantor bagi Dinas Kesehatan Provinsi dan kantor-kantor kesehatan lainnya beserta staf, di semua daerah yang terkena bencana. Mengirimkan peralatan kantor dan peralatan informasi berbasis teknologi serta kendaraan untuk kantor dinas kesehatan provinsi agar dapat berfungsi lebih baik.</p> <p>Aceh, and develop a training plan to fulfill unmet needs. Menyediakan bantuan logistic ke kantor dinas kesehatan kabupaten di Meulaboh. Menetapkan unit perencanaan di Dinas Kesehatan Provinsi dan menggunakan tenaga ahli perencanaan kesehatan lainnya dari berbagai provinsi di Indonesia.</p> <p><i>Control Penyakit melalui Communicable</i> Perluasan dan penguatan kapasitas yang ada dalam observasi terhadap penyakit dan respon terhadap wabah. Mendirikan laboratorium kesehatan umum dengan kapasitas standar dan pelatihan bagi staf nasional. Mendatangkan ahli dibidang vector-borne diseases dan seorang entomologist ke Banda Aceh, dan memastikan suplay yang cukup untuk obat anti malaria dan pemeriksaan melalui diagnosa cepat di setiap kabupaten.</p>
2. Penampungan Spontan				
3. Komunitas Penampung				
4. Tempat Relokasi				
5. Dukungan untuk Pemulangan dan Pemulihan Dini				
6. Populasi lain yang terkena dampak				

Pilihan Bantuan	Target pop.	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
		<p>(lanjutan)...</p> <p>5. Bantuan yang diberikan juga harus merespon keinginan dari mereka yang terimbas bencana dan ikut melibatkan masyarakat secara aktif. Bantuan yang diberikan harus sesuai dengan standart internasional (Khususnya Sphere Project)</p> <p>6. Relokasi bagi pengungsi harus benar-benar merupakan bantuan tanpa dipungut biaya apapun.</p>		<p>(lanjutan)...</p> <p>Mendirikan pengendalian TBC di Banda Aceh, dengan memulai program DOTS.</p> <p>Melanjutkan pelaksanaan kampanye penyakit campak bagi 1,3 juta anak-anak yang berumur antara 6 bulan sampai 15 tahun di Provinsi Aceh.</p> <p>Membuat perencanaan kerja untuk mendirikan pelayanan EPI di seluruh daerah yang terkena bencana.</p> <p><i>Kesehatan lingkungan, Air dan Sanitasi</i> Menyerahkan bantuan peralatan yang berhubungan dengan air dan sanitasi dan mengirimkannya ke daerah-daerah yang terkena bencana termasuk sabun batangan Chlorine Tablets, sabun cuci batangan dan, paket peralatan kesehatan, Jerigen untuk bahan konstruksi bagi WC dan sumur serta bubuk kaforit (untuk membersihkan sumur).</p> <p>Mendatangkan mobil tinja untuk Kota banda Aceh. Mendatangkan Mobil Tangki Air untuk Banda Aceh. Berinisiatif untuk melakukan survey bio-medical dan pengolahan sampah yang berbahaya/ pembuangan. Menyediakan bantuan teknis dan saran untuk keamanan makanan di tenda-tenda pengungsi dan daerah lainnya yang terkena bencana.</p> <p><i>Dukungan Psycho-social</i> Melakukan kajian cepat mengenai besaran dan distribusi kebutuhan psiko-sosial dan psikolog.</p> <p>Mendata rekanan dan LSM local untuk mengirim bantuan di area tersebut. Train community leaders.</p> <p><i>Kesehatan Reproduksi dan Anak</i> Menyediakan pelayanan bersalin dan anak yang baru lahir, termasuk didalamnya alat kontrasepsi bagi pengungsi. Membuat sistem pengawasan nutrisi</p>

Pilihan Bantuan	Target pop.	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
				<p>(lanjutan)...</p> <p><i>Memastikan pelayanan kesehatan yang memadai di tempat relokasi dan tempat penampungan</i></p> <p>Bekerja bersama pemerintah untuk memastikan bahwa rencana relokasi sesuai dengan standard Project Sphere dalam bidang kesehatan.</p> <p>Memastikan bahwa bantuan yang tersedia untuk pengungsi juga bias digunakan oleh pengungsi yang ada di rumah keluarga.</p>

PENDIDIKAN
Rencana Kegiatan

Pilihan Bantuan	Target pop.	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
<p>1.Penampungan Sementara Masyarakat</p> <p>2.Spontaneous Settlements</p> <p>3.Host Communities</p> <p>4.Relocation Sites</p> <p>5.Support to Early Return and Recovery</p> <p>6.Other Affected Populations</p>	<p>Target adalah seluruh anak usia sekolah dengan prioritas utama adalah anak-anak yang ada di sekolah dasar. Perkiraananya adalah sebanyak 450.000 anak.</p> <p>Pelatihan 2000 orang guru yang akan ditempatkan dimasing-masing kelas di akhir tahun 2005 sementara yang telah dilatih. 3000 orang yang siap diperkerjakan secepatnya.</p> <p>Selanjutnya, jumlah guru untuk kegiatan mengajar yang utuh sebelum tsunami diperkirakan sebanyak 62.000 orang</p>	<p>Kebijakan ini mencakup ke-6 pilihan bantuan</p> <p>Seluruh kebijakan dalam bidang pendidikan adalah untuk menjamin akses pada kualitas dasar pendidikan untuk semua anak-anak dalam lingkungan yang bersahabat bagi anak-anak.</p> <p>Sebagai penentu dalam pengambilan kebijakan adalah Menko Kesra, Pendidikan dan Agama</p> <p>Anak-anak sekolah yang berasal dari sekolah yang rusak karena gempa dan tsunami akan digabungkan dengan sekolah terdekat yang masih tersisa, meskipun ada kesulitan yang diakibatkan oleh penambahan murid di kelas dan berkurangnya kapasitas belajar. Ruangan belajar sementara akan disediakan disekolah sekolah yang jumlah muridnya bertambah.</p> <p>Dalam kasus di pusat relokasi, upaya terakhir adalah pembangunan sekolah tenda dimana anak-anak yang tidak tertampung diluar dapat belajar disini.</p>	<p>Strategi ini mencakup ke-6 pilihan bantuan</p> <p>Strategi yang paling dibutuhkan dalam jangka pendek dimaksudkan untuk mengembalikan aktifitas anak-anak seperti semula</p> <p>Secara umum, pemulihan secara singkat ke keadaan normal dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar dan bermain di lingkungan yang seperti biasanya dan aman Dan dalam hal ini intervensi terhadap lingkungan yang layak harus dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mengalami trauma atas hal yang terjadi. Kegiatan tersebut meliputi pendistribusian peralatan sekolah, pembersihan sekolah, melakukan rehab dan perbaikan serta perlengkapan untuk supply air bersih dan fasilitas sanitasi.</p> <p>Dalam strategi jangka panjang, difokuskan pada pemulihan secara keseluruhan ke keadaan lingkungan yang normal bagi anak-anak</p>	<p>Kegiatan ini mencakup ke-6 pilihan bantuan</p> <p><i>Untuk menjamin akses bagi seluruh anak-anak dalam lingkungan belajar yang aman dan layak</i></p> <p>Kegiatan yang harus segera dilakukan (1 Feb-1 Juli)</p> <p>Penambahan pengkajian secara singkat terhadap daerah pembelajaran untuk menginformasikan agar dilakukan intervensi. Dalam hal ini termasuk juga data yang relevan tentang nama dan lokasi sekolah, jumlah guru dan murid, kondisi sekolah, kondisi fasilitas air bersih serta sanitasi dan sebagainya. Database akan diinstal ke departemen pendidikan tingkat provinsi yang meliputi semua sekolah dan madrasah.</p> <p>Support school cleaning activities (including minor repairs and painting as appropriate) to allow for a rapid return to those schools which have suffered minor damage.</p> <p>Membantu dalam kegiatan pembersihan sekolah dan supply untuk kegiatan pengajaran seperti School in a Box, Recreation Kits dan text books.</p> <p>Membantu dalam menyiapkan lokasi pembelajaran sementara.</p> <p>Membantu dalam perbaikan dan penempatan peralatan dan perlengkapan kantor di kantor dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/ kota agar dapat memulai kegiatan administrasi pendidikan.</p> <p>Membantu dalam konstruksi supply air bersih dan fasilitas sanitasi disemua sekolah dengan pemisahan fasilitas antara murid laki-laki dan perempuan, dan antara guru laki-laki dan perempuan.</p> <p><u>Procurement, pre-positioning and distribution of supplies in advance of the school year.</u>tahun ajaran sekolah.</p>

Pilihan Bantuan	Target pop.	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
		<p>(lanjut)...</p> <p>Penggantian secepatnya dari guru-guru yang hilang atau yang tidak berada ditempat dan hal ini akan melibatkan rekrutmen dan pelatihan bagi 3000 orang guru termasuk juga guru-guru relawan</p> <p>Tidak ada keharusan dalam menggunakan seragam sekolah dalam proses belajar</p> <p>Sekolah akan digunakan sebagai pusat masukan bantuan lainnya yang diinginkan untuk anak-anak di daerah yang merupakan bagian dari perlindungan kesehatan, perlindungan psychosocial serta pengadaan air bersih dan sanitasi</p> <p>Dalam konteks sekolah asrama seperti Pesantren, anak-anak yang mengikuti ini harus mempunyai keluarga yang merawat mereka bila sedang tidak sekolah dan mempertahankan hubungan secara reguler dengan keluarga dan masyarakat. Sekolah asrama seharusnya tidak digunakan sebagai panti asuhan dimana mereka harus berada disana selamanya tanpa berhubungan dengan keluarganya (walaupun oleh keluarga kandungnya, orang tua asuh ataupun orang tua angkatnya)</p>	<p>(lanjut)...</p> <p>Rehabilitasi dan konstruksi dari beberapa sekolah dengan menetapkan standar minimum dimana dilengkapi dengan supply air, fasilitas sanitas dan tempat bermain.</p> <p>Pengrekrutan dan pelatihan bagi tenaga pengajar, yang sesuai dengan standar minimum dan bukan hanya menggantikan guru-guru yang hilang tapi juga untuk menjamin kualitas penyampaian pendidikan dengan baik dengan rasio yang layak antara guru dan murid</p> <p>Kelanjutan dari kegiatan belajar mengajar yang sepenuhnya akan dimulai diawal tahun ajaran baru yaitu July 2005, dan hal tersebut merupakan batas waktu bagi pendidikan setelah Tsunami di Aceh. Hal ini akan memberikan waktu untuk pelaksanaan perencanaan yang lebih mendetail dan kegiatan rekonstruksi, ...dan pendistribusian supply, pelatihan guru dan aktifitas bantuan psychosocial agar dapat memulai kegiatan belajar sepenuhnya di bulan July 2005.</p>	<p>(lanjut)...</p> <p>Menyetujui standar minimum dalam segala hal yang berhubungan dengan sekolah seperti atap anti gempa, dimana didalamnya termasuk fasilitas standar bagi penyediaan air bersih dan sanitasi.</p> <p>Secepatnya dimulai untuk merehabilitasi dan merekonstruksi sekolah-sekolah yang teridentifikasi oleh Depdiknas dimana masing-masing kegiatan konstruksi bisa dimulai segera. RALS akan menyediakan informasi tentang lokasi mana saja yang membutuhkan kajian yang lebih detil dan akan diminta sesuai dengan integritas secara struktural</p> <p><i>Kegiatan Jangka Menengah (1Maret to 31 Des.)</i></p> <p>Untuk strategi jangka panjang, termasuk didalamnya melanjutkan rekonstruksi dan penempatan dari sekolah-sekolah yang telah di jelaskan diatas. Dalam hal ini, sebagai standar bagi lingkungan sekolah yang sesuai dengan anak-anak akan disediakan panduan konstruksinya.</p> <p>Mensuplai kebutuhan sekolah yang memadai untuk murid-murid dan guru-guru dan juga buku pelajaran yang digunakan to be in pace as a minimum</p> <p><i>Memastikan tersedianya pendidikan yang berkualitas untuk semua anak-anak yang berada di daerah-daerah yang terkena bencana.</i></p> <p>Kegiatan pelatihan untuk guru-guru tersebut difokuskan pada bantuan psychosocial, pendidikan tentang perdamaian, cultural issues dan etika.</p> <p>Membantu dalam mencari guru-guru training yang potensial. Membantu orientasi para pelatih untuk mengupdate modul training akta IV.</p> <p>Membantu pelatihan bagi 1000 orang guru dalam proses pelatihan akta IV dimana akan disediakan formal content dalam kegiatan pelatihan bagi guru-guru tersebut. Depdiknas bertanggung dalam merekrut LSM-LSM yang akan membantu dalam pelaksanaan pelatihan dan Depdiknas yang akan mengatur seluruh proses pelatihan. Dalam strategi yang kompetitif akan dipastikan bahwa guru-guru yang akan dipekerjakan adalah guru-guru terbaik yang sudah biasa berhadapan dengan kelas.</p>

Pilihan Bantuan	Target pop.	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
				<p>(lanjutan)...</p> <p>Menyiapkan rencana untuk pengidentifikasian dan pengiriman guru-guru yang sudah dilatih (Diidentifikasi bahwa sudah ada 3.000 orang yang disiapkan oleh Depdiknas)</p> <p>For non-formal education and vocational training it will be important to create opportunities for children whose possibilities to attend formal schooling has been compromised due to the disaster, in order to complement formal education activities. These may include children who now have to assume the head of the household role due to loss of parents and other normal support mechanisms. Untuk sekolah non formal dan vocational training akan menjadi sangat penting dalam membangun kesempatan bagi anak-anak dimana kemungkinan untuk mengikuti sekolah formal sudah dikompromikan setelah terjadinya bencana, sebagai tambahan bagi kegiatan pendidikan. Dan hal ini juga termasuk anak-anak yang kehilangan orang tuanya serta mekanisme bantuan lainnya.</p> <p>Memastikan bantuan bagi Manajemen Sekolah Membantu persiapan material dan peralatan agar kantor-kantor pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memulai kegiatan administrasi pendidikan secara normal.</p> <p>Menguraikan strategi dan bantuan serta implementasi mekanisme dan modul pelatihan ulang agar semua staf memiliki kemampuan yang sama.</p> <p>Memberikan bantuan kepada dewan pengawas sekolah berupa alat-alat dan pengetahuan agar tersedia kualitas bantuan dan monitoring yang layak dalam penyampaian pelajaran di sekolah-sekolah.</p> <p>Memastikan sector koordinasi berjalan dengan baik agar dapat memberdayakan seluruh dinas-dinas atau departemen yang ada di pemerintahan provinsi untuk dapat menyiapkan kepemimpinan dan panduan bagi semua sector.</p> <p>Memastikan agar lingkungan sekolah menjadi aman, bersahabat dengan anak-anak dan kondusif untuk belajar. Dan hal ini tidak hanya untuk ruangan kelas, tapi juga seluruh lingkungan sekolah, termasuk penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi dan tempat bermain.</p> <p>Penjelasan mengenai standar minimum, desain dan implementasi dari perencanaan bagi lingkungan yang bersahabat untuk anak-anak, mengikuti konstruksi dari fasilitas yang memadai.</p>

PENGHIDUPAN DAN PEMULIHAN
Rencana Kegiatan

Pilihan Bantuan	Target pop.	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
<p>1.Penampungan Sementara Masyarakat</p>	<p>Tidak tersedia data tentang jumlah target yang pasti.</p> <p>Untuk itu dirasa perlu untuk melakukan penelitian agar dapat ditetapkan kebutuhan yang konkrit dan pengimplementasian program penghidupan</p>	<p>Kebijakan dibawah ini mencakup ke-6 pilihan bantuan</p> <p>Semua rekanan akan membantu mereka yang terkena dampak bencana, seperti....dan kehidupan yang terkena bencana harus melalui koordinasi dan kooperasi dengan pimpinan sipil dan kepala desa di daerah yang terkena bencana dengan penekanan utama pada di semua bidang dalam proses perencanaan (Perencanaan, konsultasi dan Implementasi)</p> <p>An overarching assumption, however, is that any opportunistic livelihood programs must, while meeting a new demand, also be sustainable in the longer-term.</p> <p>Tidak dapat disangkal bahwa industri tradisional adalah yang terbesar yang terkena tsunami (seperti : perikanan, pertanian, perdagangan) yang seharusnya merupakan sumber penghidupan yang utama, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh beberapa organisasi untuk kedepan dapat lebih difokuskan pada hal tersebut.</p>	<p>Strategi dibawah ini mencakup ke-6 pilihan bantuan</p> <p>Melibatkan penanggung jawab regional dan nasional dalam proses perencanaan. Dalam beberapa proses akan dipastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan oleh mereka-mereka yang terkena bencana akan dihubungkan dengan secara layak dengan pemilihan yang lebih luas dan pengembangan platform akan diedarkan dan diatur dibawah pimpinan BAPPENAS.</p> <p>Pendekatan multisektor akan diambil oleh semua rekan agencies dalam pengembangan dan pengimplementasian program pemulihan dan penghidupan.</p> <p>Disamping itu, pendekatan yang seimbang akan diambil dan dipastikan bahwa program pemulihan untuk perorangan (diupah untuk bekerja) atau untuk berkelompok (regenerasi dari industri dasar masyarakat) akan ditawarkan sebagaimana layaknya.</p>	<p>1. Penampungan Sementara Masyarakat</p> <p>Difokuskan pada solusi penghidupan sementara (tidak permanent) dan akan dilanjutkan melalui solusi jangka panjang.</p> <p>Difokuskan pada strategi penghidupan perorangan dan kemudian dilanjutkan dengan strategi yang berorientasi kepada masyarakat keseluruhan.</p>

Pilihan Bantuan	Target pop.	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
2. Penampungan spontan		<p>(lanjutan)...</p> <p>Disamping itu, mungkin akan lebih berguna bila perhatian lebih difokuskan pada mata pencaharian lain yang mungkin bisa tercipta dan mungkin muncul setelah terjadinya bencana, dan mungkin akan membantu bila mereka diikuti sebagai pekerja konstruksi dan pemulihan (seperti : membuat furniture, tukang ledeng, tukang las dll) Dan sebagai asumsi lain, bagaimanapun juga harus ada program yang dapat menciptakan mata pencaharian lainnya sementara ditemukan penghasilan baru untuk jangka panjang akan dilaksanakan secara berkesinambungan</p> <p>It may also be necessary to explore new ways of performing traditional industries, to gain greater efficiencies which will benefit the community in the longer-term. For example, increase the yield from food-processing by implementing a newer technology, which ultimately increases the capacity of the community. Again, any new approaches must be sustainable in the longer-term.</p>	<p>(lanjutan)...</p> <p>Proses koordinasi dengan masyarakat yang terkena bencana harus melibatkan civil society (pimpinan atau utusan dari penghuni), penanggung jawab regional dan nasional selama hal tersebut relevan dengan rekan agencies untuk memastikan kelayakan dari proses yang berbasis pada masyarakat.</p> <p>Prioritas dari program penghidupan harus dimulai dari masyarakat sebagai titik awal. Dalam proses akan ditanyakan tentang apa yang akan dilakukan oleh orang yang tertimpa bencana tersebut untuk dirinya sendiri dan apa bentuk bantuan yang mereka inginkan.</p> <p>Sebagai proses sambilan, proses konsultasi/ perencanaan masyarakat akan menyediakan survey pasar untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang kebutuhan dan celah.</p>	<p>2. Penampungan Spontan</p> <p>Difokuskan pada solusi penghidupan sementara (non permanent) dan akan dilanjutkan dengan solusi jangka panjang.</p> <p>Difokuskan pada strategi penghidupan masing-masing orang dan kemudian dilanjutkan dengan solusi jangka panjang yang berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan.</p>

Pilihan Bantuan	Target pop.	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
3.Komunitas Penampung		<p>(lanjutan)...</p> <p>Juga akan sangat membantu bila dilakukan terobosan baru dalam mengeksplorasi bentuk-bentuk dari industri tradisional agar tercipta efisiensi yang sangat baik dan menguntungkan bagi masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, penambahan industri dari sector pemrosesan makanan, dengan mengimplementasikan teknologi baru yang tentu saja menambah kapasitas masyarakat. Dan juga, semua pendekatan-pendekatan baru mungkin akan tersedia untuk jangka panjang.</p>	<p>(lanjutan)...</p> <p>Proses sambilan lainnya ada dengan menyediakan tenaga teknis dalam memberikan arahan dan petunjuk atas program penghidupan, selama didapatkan ide-ide untuk pelatihan teknis dan mengembangkan kapasitas personal yang relevan dengan penghidupan.</p>	<p>3.Komunitas Penampung</p> <p>Difokuskan pada solusi jangka panjang dengan membangun perumahan yang berkapaitas dapat menampung secara keseluruhan.</p> <p>Menekankan pada program penghidupan yang berbasis kemasyarakatan, lebih daripada strategi penghidupan perorangan. Melakukan konsultasi dengan masyarakat tentang keinginan dan kebutuhan pasar (tidak membuat labil pasar yang ada)</p>
4.Tempat Relokasi				<p>4. Tempat Relokasi</p> <p>Menekankan pada solusi dari penghidupan yang semi permanen ke penghidupan yang lebih permanen.</p> <p>Assess relocation site for potential livelihood opportunities, either within the site or in neighboring community. Pengkajian terhadap tempat relokasi guna mencari peluang yang potensial bagi penghidupan, dan juga di tempat yang ada disekitar ataupun berdekatan dengan tempat relokasi.</p> <p>Melibatkan pengungsi, pemimpin di lokasi penampungan dan beberapa penanggung jawab dari pemerintah dalam program penentuan daerah yang layak digunakan.</p> <p>If acceptable to site leaders/management, interview individuals, and for those interested in early return and recover, offer individualized livelihood solutions (alternatives) which ultimately amount to self-starter kits. Jika dapat diterima oleh pemimpin di lokasi, dilanjutkan dengan interview perorangan dan bagi mereka yang tertarik untuk pengembalian dan pemulihan lebih awal maka ditawarkan solusi (alternative) penghidupan secara individu, dimana pada akhirnya</p>

Pilihan Bantuan	Target pop.	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
5. Dukungan untuk Pemulangan dan Pemulihan Dini				<p>5. Dukungan untuk Pemulangan dan Pemulihan Dini</p> <p>Disini difokuskan pada solusi penghidupan yang berkesinambungan dengan beberapa tingkat lebih permanen</p>
6. Populasi lain yang terkena dampak				<p>6. Populasi lain yang terkena dampak</p> <p>Pengkajian terhadap kemungkinan untuk mengulang/ memperbaiki / merehab kembali industri/ penghidupan tradisional mereka.</p> <p>Menjajaki kepada orang-orang yang terkena bencana tersebut akan kemungkinan untuk mengganti usaha/ penghidupan mereka dan menawarkan kesempatan perorangan untuk memulai usaha sendiri.</p>

**PERLINDUNGAN
Rencana Kegiatan**

Pilihan Bantuan	Target populasi	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
1. Pemukiman sementara masyarakat	Diperkirakan bahwa penerima bantuan berjumlah	Kebijakan dibawah ini mencakup ke-6 pilihan bantuan.	Strategi dibawah ini mencakup ke-6 pilihan bantuan.	Kegiatan-kegiatan dibawah ini mencakup ke-6 pilihan bantuan
2. Pemukiman spontan	sekitar 200,000 pengungsi yang saat ini tinggal di kamp-kamp dan sekitar 260,000	Hak dari populasi yang terkena dampak bencana tsunami harus dilindungi atas dasar hukum internasional dan nasional yang relevan.	Strategi untuk perlindungan didasarkan pada beberapa dokumen internasional dan nasional seperti: a) Prinsip-Prinsip Panduan Penanganan Pengungsi Internal PBB; b) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia c) Konvensi Perlindungan Hak Anak; d) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi; e) Code of Conduct Lintas Lembaga dan Buletin Sekretaris Jendral PBB; e) Hukum Perlindungan Anak (23/2002) dan Hukum Pernikahan (1/1974); f) Secretary Council Resolution 1325 tentang Perempuan, Kedamaian dan Keamanan; serta Hukum Indonesia yang Relevan.	Anak yang Terpisah Desiminasi kebijakan pemerintah mengenai anak yang terpisah. Advokasi untuk kebijakan ini dilakukan pada tingkat nasional, kabupaten dan kecamatan, khususnya mengenai pelayanan berbasis keluarga dan menghindari institusionalisasi dari anak-anak yang terpisah. Implementasi mekanisme mencegah terjadinya perpisahan keluarga khususnya dalam pergerakan penduduk. Lemaba-lembaga yang bekerja dengan masalah ini menghasilkan system bersama untuk registrasi dan reunifikasi keluarga bagi anak yang terpisah atau tidak didampingi Memberikan pelayanan registrasi bagi anak yang terpisah dan reunifikasi keluarga. Memberikan dukungan bagi keluarga yang memperhatikan anak yang terpisah. Memberikan dukungan untuk penentuan solusi yang paling berkesinambungan bagi masing-masing anak dengan menerapkan prinsip "atas kepentingan terbaik dari anak".
3.Host Communities / Komunitas Penampung	260,000 pengungsi tinggal bersama keluarga penampung/host communities serta sekitar 500,000 orang lainnya atau keluarga penampung.	Untuk pengungsi internal (IDP), Prinsip-Prinsip Panduan Penanganan Pengungsi Internal PBB bisa menjadi dasar pembuatan kebijakan dan program.	Hukum Perlindungan Anak (23/2002) dan Hukum Pernikahan (1/1974); f) Secretary Council Resolution 1325 tentang Perempuan, Kedamaian dan Keamanan; serta Hukum Indonesia yang Relevan.	
4. Tempat Relokasi				
5. Dukungan untuk Pemulangan Dini dan Pemulihan		Masyarakat harus mempunyai akses yang memadai pada informasi, turut berpartisipasi dan dikonsultasikan dalam pengambilan keputusan mengenai rencana dan pilihan pemukiman	Program akan mengatasi masalah perlindungan dan legalitas yang muncul dari atau terjadi karena bencana.	
6. Populasi lain yang terkena dampak	<i>Perlu diupdate untuk mengacu pada data Bakornas Jakarta.</i>	Penempatan di lokasi pemukiman harus dilakukan dengan sukarela.		Dukungan Psiko-Sosial Melakukan kajian kebutuhan psiko-sosial dari populasi yang terkena dampak. Menghasilkan, mendesiminasi dan mengadvokasi kebijakan psiko-sosial bersama yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, sosial dan masyarakat. Memperkuat dan menciptakan kampanye informasi public mengenai bantuan psiko-sosial.

Pilihan Bantuan	Target populasi	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
		<p>(lanjutan)...</p> <p>Solusi berkesinambungan untuk pemukiman harus menjadi prioritas. Prioritas harus diberikan pada pemulangan pengungsi ke tempat asal yang mereka inginkan.</p> <p>Kamp-kamp saat ini mempunyai banyak resiko, termasuk kurangnya mekanisme perlindungan masyarakat. Camps present many risks, terlalu padat dan kurang privasi. Karena itu pilihan pemukiman lain harus diprioritaskan.</p> <p>Apabila diinginkan oleh masyarakat dan memungkinkan, pemukiman sebaiknya dekat lokasi awal. Persatuan keluarga dan masyarakat harus dipromosikan.</p> <p>Semua pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, social harus bisa diakses oleh populasi yang terkena dampak tanpa diskriminasi.</p>	<p>(lanjutan)...</p> <p>Strategi secara luas adalah sebagai berikut:</p> <p>Memastikan perhatian dan perlindungan dari anak-anak yang terpisah/tidak terdampingi, termasuk reunifikasi keluarga, dan penyediaan perlindungan berbasis keluarga bagi anak yatim-piatu dan pencegahan perpisahan. Memberikan dukungan psiko-sosial bagi mereka yang terkena dampak bencana, dengan fokus pada memperkuat daya tahan mereka yang selamat dan jaringan dukungan mereka.</p> <p>Melindungi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi, melalui partisipasi masyarakat dan kegiatan penyadaran, pelatihan dan mekanisme pertanggungjawaban bagi yang memberikan pelayanan, monitor dan pelaporan serta memperkuat penegakan hukum.</p> <p>Memastikan hak tanah, warisan dan identifikasi yang diperlukan.</p>	<p>(lanjutan)...</p> <p>Menambah dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada pusat-pusat pelayanan bagi perempuan dan pusat-pusat yang ramah pada anak, termasuk menciptakan kelompok remaja, kelompok perempuan, dll.</p> <p>Memberikan pelatihan dan dukungan yang berkelanjutan pada anggota masyarakat dalam pelayanan psiko-sosial dasar, termasuk pada orang tua, guru, pekerja kesehatan, pekerja social, masyarakat, pemuka agama, dll. Memperkuat mekanisme pemulihan secara tradisional.</p> <p>Mendukung pekerja social, badan penyuluhan sekolah, psikolog untuk menciptakan kelompok penyuluhan, kelompok pendukung dan aktivitas bermain terstruktur bagi anak-anak, remaja dan dewasa yang masih membutuhkan bantuan.</p> <p>Memastikan bahwa system dan mekanisme rujukan telah ada pada tingkat kecamatan juha klinik professional bagi pelayanan psikologi bagi mereka yang mempunyai masalah psikologi.</p> <p>Kekerasan dan Eksploitasi</p> <p>Mendukung instansi pemerintah seperti BAKORNAS dan Departemen Sosial untuk menghasilkan data pengungsi yang dibagi atas jenis kelamin dan usia.</p> <p>Melakukan kajian oleh staf yang terlatih mengenai kebutuhan dari kelompok khusus seperti perempuan dan anak-anak.</p> <p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mempromosikan partisipasi perempuan dan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan.</p> <p>Memastikan bahwa perencanaan dari berbagai pilihan penampungan menjawab isu perlindungan dan keamanan. Kelompok kerja dan komite pemukiman harus juga melibatkan ahli gender dan perlindungan anak juga perwakilan masyarakat. Sesi konsultasi harus dilakukan dengan melibatkan semua perwakilan masyarakat sebelum keputusan diambil khususnya mengenai pemilihan, perencanaan lokasi dan/atau perumahan.</p>

Pilihan Bantuan	Target populasi	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
		<p>(lanjutan)...</p> <p>Program-program intervensi harus dikembangkan dan diberikan pada populasi yang terkena dampak termasuk berbagai macam kategori pengungsi (yang tinggal di pemukiman spontan, tempat relokasi atau yang kembali ke tempat asal mereka) dan komunitas penampung, namun juga memperhatikan kerentanan pengungsi.</p> <p>Upaya khusus harus dilakukan untuk mempromosikan integrasi antara kelompok penerima bantuan yang berbeda-beda melalui pelayanan yang menguntungkan semua dalam satu wilayah geografis. Semua pelayanan di dalam kamp bersifat sementara.</p>	<p>(lanjutan)...</p> <p>Kerentanan bervariasi dalam masyarakat yang terkena dampak dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan program. Laki-laki, perempuan dan anak-anak dapat saja terlupakan atau berpotensi merupakan resiko bergantung pada kerentanan sebelumnya, tingkat kehilangan dan mekanisme bertahan. Perlu juga menjadi perhatian adalah kebutuhan khusus dari perempuan pada usia produktif, lanjut usia, remaja laki-laki dan perempuan, keluarga yang dipimpin seorang anak dan perempuan yang tidak didampangi</p> <p>Dukungan akan diberikan pada mekanisme pemerintah nasional, non-pemerintah dan masyarakat mengenai perlindungan. Partisipasi dari organisasi-organisasi ini dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi dari strategi-strategi sangat penting.</p>	<p>(lanjutan)...</p> <p>Memastikan bahwa pemilihan dan perencanaan lokasi mempertimbangkan isu perlindungan seperti kesatuan keluarga dan komunitas, privasi yang cukup, perencanaan fasilitas sanitasi, resiko keamanan di komunitas disekitarnya.</p> <p>Menghasilkan strategi spesifik dan jadwal untuk mempromosikan pemulangan secara dini dan memastikan bahwa jumlah mereka yang berada dalam penampungan semi-permanen dibuat seminimum mungkin. Mengarusutamakan gender disemua system distribusi untuk memastikan semua segmen masyarakat mempunyai akses pada pelayanan tanpa resiko eksploitasi atau kekerasan.</p> <p>Memastikan bahwa semua pekerja kemanusiaan sadar akan Code of Conduct masing-masing organisasi dan mematuhi melalui diseminasi dan pelatihan serta menerapkan system yang cocok untuk menginvestigasi dan memberikan sanksi atas pelanggaran. Melatih staf kemanusiaan dan penyedia jasa lainnya mengenai isu gender dan perlindungan anak. Meningkatkan kapasitas polisi untuk memberikan perlindungan termasuk mengidentifikasi, mengherahkan dan melatih focal point perlindungan anak/perempuan di kepolisian. Memperkuat kapasitas polisi dalam menginvestigasi masalah kekerasan dan memperkuat pertahanan sipil. Memperkuat kapasitas aparat penegak hukum lainnya untuk melindungi perempuan/anak, termasuk hakim, pengacara, penuntut hukum serta menghasilkan proses hukum yang ramah perempuan/anak. Bekerja secara erat dengan pemerintah Indonesia termasuk TNI untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat sipil.</p> <p>Melakukan kampanye public mengenai isu perlindungan, dengan memfokuskan pada peran masyarakat dalam mengurangi kekerasan dan eksploitasi. Memastikan bahwa pelayanan seperti kesehatan, psiko-sosial dan hukum tersedia.</p> <p>Hak Tanah, Hukum Warisan dan Dokumen Identitas Mengimplementasi mekanisme untuk memastikan bahwa masyarakat tidak akan direlokasi atau dikembalikan ke lokasi yang bukan merupakan milik mereka.</p> <p>Mendukung instansi pemerintah yang terkait dalam mengatasi masalah hak tanah dan masalah warisan. Memberikan bantuan teknis pada pemerintah mengenai isu hak tanah dan warisan dengan focus khusus pada hak perempuan dan anak yang terpisah atau yatim-piatu.</p> <p>Mendukung kantor-kantor registrasi untuk secepat mungkin mengeluarkan dokumen identitas bagi semua pengungsi yang kehilangan dokumen mereka. Mengimplementasi mekanisme kompensasi yang adil bagi mereka yang kehilangan tanah atau aset</p>

AIR DAN SANITASI
Rencana Kegiatan

Pilihan bantuan	Target pop. Lokasi (Mitra)	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
<p>1. Penampung Sementara Masyarakat</p>	<p>Semua lokasi selolah (UNICEF)</p> <p>WHO</p> <p>IFRC/PMI: Meulaboh, Samalanga, Teunom, Lamno, Patek, Celang, Sigli</p> <p>OXFAM Banda Aceh Aceh Besar Meulaboh</p> <p>IRD</p> <p>CRS</p> <p>CARDI/ IRC</p> <p>ISLAMIC RELIEF Banda Aceh, Aceh Besar, Krueng Raya</p> <p>CARE</p>	<p>Kebijakan dibawah ini mencakup ke-6 pilihan bantuan</p> <p>Mitra-mitra Air dan Sanitasi menyadari bahwa hak atas air berkaitan dengan hak asasi manusia lainnya, termasuk hak kesehatan, perumahan, pendidikan, perlindungan dan makanan</p> <p>Mitra-mitra air dan sanitasi akan menegakkan hak-hak ini bagi semua kelompok yang terkena dampak tsunami, tanpa memandang lokasi, asal atau afiliasi.</p> <p>WATSAN interventions will ensure that the rights of people to maintain kinship bonds and recover land rights and livelihood capacity are not compromised in any way by the actions of sector partners.</p> <p>Mitra Air dan Sanitasi akan memastikan adanya transisi yang baik dan berkelanjutan dari fase pemberian bantuan tanggap darurat menuju ke kegiatan pemulihan jangka panjang dan rehabilitasi</p>	<p>Strategi dibawah ini mencakup ke-6 pilihan bantuan.</p> <p>Mitra-mitra sektor menyadari bahwa peningkatan yang berkesinambungan dari pelayanan air dan sanitasi hanya bias dicapai apabila semua kebutuhan populasi yang terkena dampak telah terpenuhi. Kita ingin memberikan prioritas yang penting pada intervensi yang memiliki dampak langsung pada pemulangan dan pemulihan dini populasi yang terkena dampak, diikuti oleh intervensi yang melayani kebutuhan air dan sanitasi pengungsi di komunitas penampung (khususnya yang bersebelahan dengan sekolah, pusat kesehatan, rumah ibadah), pengungsi di penampungan spontan dan akhirnya pengungsi yang tinggal di tempat relokasi yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>Kompilasi dan diseminasi informasi yang bisa dipercaya mengenai status kerentanan, kebutuhan air dan sanitasi dan pelayanan yang diberikan pada pengungsi untuk secara efektif mengarahkan dan memprioritaskan intervensi mitra lebih dari bantuan tanggap darurat yaitu transisi menuju fase rehabilitasi dan rekonstruksi.</p>	<p>1. Penampungan Sementara Masyarakat</p> <p>Memberikan air dalam jumlah minimum untuk keperluan minum, maska dan mencuci melalui truk tanki air dan rehabilitasi sumur dengan dukungan juga oleh mobile water treatment plant yang dikelola oleh operator lokal yang dilatih.</p> <p>Memberhentikan penggunaan water treatment plants apabila jaringan perpipaan air telah dikembalikan ke kondisi yang baik dan dioperasikan dengan biaya yang ditagih dari pelanggan.</p> <p>Memberikan fasilitas toilet yang bersih menurut standar minimum dan mengaktifkan pembersihan lubang WC, pengumpulan sampah padat dan vector control operations untuk mendapatkan kondisi sanitasi yang baik di semua tempat penampungan pengungsi</p> <p>Mempromosikan kebiasaan hidup bersih di sekolah, mesjid dan fasilitas kesehatan dengan metode partisipatif, pelayanan media public dan saluran-saluran penyiaran.</p> <p>Mempromosikan tradisi memasak air apapun kualitas air yang diberikan melalui intervensi air dan sanitasi</p> <p>Mendistribusikan bantuan non makanan untuk mempromosikan penggunaan air bersih dan kehidupan sehat untuk periode maksimum 3 bulan</p>

Pilihan bantuan	Target pop. Lokasi (Mitra)	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
2. Penampungan Spontan	<p>Banda Aceh, Aceh Besar, Meulaboh, Pidie (UNICEF) WHO</p> <p>Meulaboh, Teunom, Lamno, Patek,, Celang, Samalanga, Sigli (PMI/IFRC)</p> <p>Aceh Besar, Aceh Jaya, Meulaboh, (Oxfam)</p> <p>IRD</p> <p>CRS</p> <p>CARDI/ IRC</p> <p>Islamic Relief</p> <p>CARE</p>	<p>(lanjutan)...</p> <p>Kajian kebutuhan dan proses perencanaan untuk intervensi Air dan Sanitasi sejak awal akan melibatkan pemerintah kabupaten, propinsi dan nasional untuk memastikan kepemilikan secara nasional dan kebijakan yang memenuhi standar minimum SPHERE untuk intervensi sektor air dan sanitasi serta standar international yang telah disepakati bagi pelayanan air dan sanitasi bagi populasi di wilayah perkotaan dan pedesaan yang terkena dampak tsunami.</p> <p>Intervensi air dan sanitasi akan ditentukan berdasarkan konsultasi dengan kelompok yang terkena dampak, dengan pilihan teknis, operasional dan manajemen yang dijelaskan kepada penerima bantuan secara jelas dan tidak memihak dengan batasan-batasan yang diatur oleh aturan-aturan dan norma-norma administrasi yang berlaku</p>	<p>(lanjutan)...</p> <p>Kerjasama dengan pemerintah nasional dan propinsi dalam koordinasi air dan sanitasi untuk memastikan kepemilikan local dari kegiatan pemberian bantuan dan menghasilkan prinsip perencanaan yang jelas bagi pelayanan air dan sanitasi.</p> <p>Memastikan terpenuhinya standar SPHERE dalam pelayanan air dan sanitasi kepada pengungsi di pengungsi penampungan sementara dan komunitas penampung melalui kajian yang berkelanjutan mengenai kapasitas distribusi, kebutuhan, celah (gap) dan koordinasi distribusi asset fisik dan teknis.</p> <p>Target pelayanan air dan sanitasi adalah mendukung program pemulangan pengungsi untuk membangun kembali rumah dan kehidupan mereka dalam wilayah yang terkena dampak tsunami.</p>	<p>2. Perumahan Spontan</p> <p>Menyediakan air untuk minum, masak dan mencuci melalui truk tanki air dan penyimpanan yang didukung oleh fasilitas mobile treatment yang bertempat disekitar atau dekat pemukiman spontan</p> <p>Memberikan fasilitas toilet yang bersih menurut standar minimum dan mengaktifkan pembersihan lubang WC, pengumpulan sampah padat dan vector control operations untuk mendapatkan kondisi sanitasi yang baik di semua tempat penampungan pengungsi</p> <p>Memberikan tambahan air cuci melalui rehabilitasi sumur yang ada. Mengurangi penggunaan water treatment plants saat jumlah pengungsi mulai menurun dan memindahkannya ke lokasi komunitas penampung dan tempat relokasi.</p> <p>Mempromosikan kebiasaan hidup bersih di sekolah, mesjid dan fasilitas kesehatan dengan metode partisipatif, pelayanan media public dan saluran-saluran penyiaran.</p> <p>Mendistribusikan bantuan non makanan untuk mempromosikan penggunaan air bersih dan kehidupan sehat selama pengungsi berada dilokasi penampungan.</p> <p>Mempertahankan tradisi memasak air apapun kualitas air yang diberikan melalui intervensi air dan sanitasi</p>

Pilihan bantuan	Target pop. Lokasi (Mitra)	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
3. Komunitas Penampung	<p>Banda Aceh, Aceh Besar, School site focus – all districts (UNICEF)</p> <p>Meulaboh, Teunom (IFRC/PMI)</p> <p>Pidie, Bireuen, Aceh Utara (Oxfam) IRD</p> <p>Celang, Teunom, Meulaboh (CRS)</p> <p>Meulaboh, Lhoksamaue, Celang, Aceh Besar (Darusalaam) (CARDI/IRC)</p> <p>Banda Aceh, Aceh Besar, Krueng Raya (Islamic Relief)</p> <p>CARE</p>		<p>(lanjutan)...</p> <p>Mempromosikan transisi dari program air dan sanitasi dengan penggunaan tenaga kerja secara intensif menuju ke program cash-for-work dan kerjasama langsung melalui struktur pemerintah local (khususnya Dinas Kesehatan, Pekerjaan Umum, Kebersihan Kota dan PDAM) untuk memaksimalkan peluang pekerjaan bagi masyarakat yang sangat butuh mendapatkan kembali sumber penghidupan mereka.</p> <p>Memprioritaskan usaha rehabilitasi infrastruktur (seperti perbaikan jaringan perpipaan dan rehabilitasi sumur) ke mesjid, sekolah dan rumah sakit di komunitas penampung yang menampung beban pengungsi yang besar.</p> <p>Mempromosikan dan mempertahankan hubungan lintas sektor agar sektor kesehatan, pendidikan, pemukiman dan hak perlindungan memenuhi standard an panduan internasional yang telah disepakati.</p>	<p>3. Komunitas Penampung</p> <p>Merehabilitasi dan merekonstruksi infrastruktur air seperti sumur, system distribusi gravitasi dan jaringan perpipaan ke wilayah yang menjadi tempat penampungan pengungsi terbanyak dan tempat dimana terdapat sekolah atau fasilitas kesehatan.</p> <p>Memberhentikan penggunaan water treatment plants apabila jaringan perpipaan air telah dikembalikan ke kondisi yang baik dan dioperasikan dengan biaya yang ditagih dari pelanggan.</p> <p>Menambahkan suplai air melalui tanki air yang dibantu oleh mobile treatment plants ditempat tempat yang belum dilayani jaringan perpipaan dan konsentrasi pengungsi di komunitas penampung cukup besar.</p> <p>Menambah konstruksi WC bersih untuk mengakomodasi bertambahnya pengungsi dan kebutuhan populasi pada umumnya.</p> <p>Mengaktifkan pembersihan lubang WC, pengumpulan sampah padat dan vector control operations untuk mendapatkan kondisi sanitasi yang baik di semua tempat penampungan pengungsi</p> <p>Mempertahankan tradisi memasak air apapun kualitas air yang diberikan melalui intervensi air dan sanitasi</p> <p>Mempromosikan kebiasaan hidup bersih di sekolah, mesjid dan fasilitas kesehatan dengan metode partisipatif, pelayanan media public dan saluran-saluran penyiaran.</p> <p>Mendistribusikan bantuan non makanan untuk mempromosikan penggunaan air bersih dan kehidupan sehat untuk periode maksimum 3 bulan</p>

Pilihan bantuan	Target pop. Lokasi (Mitra)	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
4. Tempat relokasi	Banda Aceh (UNICEF) Banda Aceh, Meulaboh, Bireuen, Pidie (OXFAM)		(lanjutan)... Mempromosikan dialog partisipatif antara pengungsi penerima bantuan, pemerintah local dan aktor-aktor kemanusiaan dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh secara langsung pada penghidupan mereka yang terkena dampak tsunami.	4.Tempat Relokasi Menasihatkan kontraktor penyedia fasilitas air dan sanitasi mengenai standar internasional; untuk infrastruktur air dan sanitasi yang semi-permanen. Dimana kontraktor tidak ditunjuk, air dibantu melalui tanki air (maksimum 3 bulan) dan dilayani oleh fasilitas mobile treatment facilities didalam atau dekat tempat relokasi Mendukung pengaktifan kembali dan perpanjangan jaringan perpipaan dan pilihan air bersih lainnya ke tempat relokasi untuk menstimulasi pemulihan ekonomi. Bangun fasilitas WC semi permanent,mengatur pembersihan lubang WC, memperkuat manajemen tim sanitasi tempat relokasi untuk melaksanakan vector control operations dan pengumpulan sampah padat Apabila diinginkan untuk pemukiman yang lebih jangka panjang oleh pengungsi maka harus diadakan perpanjangan jaringan perpipaan ir terdekat atau menyediakan pilihan sumber air yang berkesinambungan dan gratis Mendistribusikan bantuan non makanan untuk mempromosikan penggunaan air bersih dan kehidupan sehat

Pilihan bantuan	Target pop. Lokasi (Mitra)	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
5. Dukungan pada Pemulangan dan Pemulihan Dini	Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie (UNICEF) Meulaboh, Teunom (IFRC/PMI) Aceh Berat, Pidie, Bireuen, Aceh Utara (OXFAM) Meulaboh, Lhoksamaue, Celang, Darusalaam (CARDI/IRC) Aceh Besar (Kreung Raya) (Islamic Relief) Simuleue (CARE)			5. Dukungan pada Pemulangan dan Pemulihan Dini Merehabilitasi dan merekonstruksi infrastruktur sumber air termasuk sumur, sumber air dengan system gravitasi dan treatment plants yang melayani jaringan perpipaan – mendukung pemuliham dari infrastruktur perpipaan air ke wilayah yang dinilai layak untuk pemulangan dini. Memberikan dukungan teknis dan manajemen untuk meningkatkan kembali kapasitas PDAM untuk manajemen system jaringan perpipaan air yang berkesinambungan dan dibayar oleh pelanggan. Membangun WC yang sesuai dengan standar nasional untuk infrastruktur permanent, dengan prioritas pada wilayah dengan populasi yang banyak seperti di wilayah sekolah, pusat kesehatan dan mesjid. Memulai kembali penyedotn lubang WC dan pengumpulan sampah padat, mempromosikan peluang sumber penghidupan yang baru melalui seleksi teknologi yang memadai dan mempromosikan bisnis skala kecil. Mempromosikan kebiasaan hidup bersih di sekolah, mesjid dan fasilitas kesehatan dengan metode partisipatif, pelayanan media public dan saluran-saluran penyiaran. Mempertahankan tradisi memasak air apapun kualitas air yang diberikan melalui intervensi air dan sanitasi

Pilihan bantuan	Target pop. Lokasi (Mitra)	Kebijakan	Strategi	Kegiatan
6.Populasi lain yang terkena dampak	Banda Aceh, Pidie (UNICEF) Banda Aceh, Aceh Besar (Islamic Relief)			<p>6.Populasi Lain yang Terkena dampak</p> <p>Melanjutkan kegiatan penyediaan air dengan truk tanki air ke wilayah yang tidak secara langsung merasakan dampak tsunami namun keterbatasan akses pada air menjadi kritis bagi pemulihan sumber penghidupan.</p> <p>Mempromosikan pengoperasian kembali dan perpanjangan system jaringan perpipaan dan sumber air lainnya ke wilayah ini untuk menstimulasi pemulihan ekonomi dan menambah kapasitas penampungan untuk mengurangi jumlah penampungan pengungsi spontan.</p> <p>Mengaktifkan pembersihan lubang WC, pengumpulan sampah padat dan vector control operations untuk mendapatkan kondisi sanitasi yang baik di semua tempat penampungan pengungsi</p>
